

Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Sesudah Covid-19)

Dwi Santoso¹

Universitas Negeri Surabaya¹

Email korespondensi: tozzy_its@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze the effects of the Regional Financial Independence Ratio, Local Revenue Effectiveness Ratio (PAD), Regional Expenditure Efficiency Ratio, Regional Expenditure Management Ratio, Local Revenue Growth Ratio, and the Fiscal Decentralization Degree Ratio on local governments financial performance. It also investigates the differences in financial performance during and after the COVID-19 pandemic in regencies and cities across East Java Province. This quantitative research employs multiple linear regression analysis and paired samples test. The study uses secondary data from the regional budget realization reports (APBD), sourced from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The sample consists of 38 regencies and cities over the 2020–2023 period, with a total of 152 observations. The results indicate that only the Local Revenue Growth Ratio has a significant effect on financial performance, while simultaneously, all financial ratios show significant influence. These outcomes are interpreted through the mathematical logic of each ratio and supported by relevant previous research. Furthermore, the paired samples test reveals significant differences in financial performance between the pandemic and post-pandemic periods, indicating a decline after the pandemic. The findings underscore the crucial role of local revenue growth in enhancing financial performance and highlight the importance of adaptive fiscal recovery strategies in the post-pandemic era. This study may serve as an evaluative reference for local governments in formulating more effective and sustainable financial management policies.

Keywords: *Regional Financial Ratios, Financial Performance of Local Governments, East Java Provincial Government*

1. PENDAHULUAN

Kinerja keuangan daerah menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab guna mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang berkelanjutan. Kinerja ini tercermin dari pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, dan kemandirian fiskal. Namun, pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal 2020 telah menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan bagi pemerintah daerah, terutama di Provinsi Jawa Timur. Penurunan PAD, tingginya belanja operasional, serta ketergantungan terhadap dana transfer pusat menjadi isu krusial yang memengaruhi kinerja keuangan kabupaten/kota.

Berbagai studi telah menyoroiti pentingnya rasio keuangan daerah dalam mengukur performa fiskal pemerintah daerah. Misalnya, Darwanis & Saputra (2014) menemukan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sementara Putri & Darmayanti (2019) menunjukkan hasil sebaliknya. Hakiki et al. (2023) menyatakan bahwa pengeluaran daerah berdampak negatif terhadap kinerja, namun Permatasari & Trisnarningsih (2022) menunjukkan

pengaruh yang positif. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian terdahulu, terutama dalam konteks masa krisis seperti pandemi.

Lebih lanjut, beberapa studi seperti Arfath & Priyono (2023) dan Pradana & Akbar (2023) berfokus pada kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, dengan tingkat kemandirian fiskal tinggi. Sebaliknya, penelitian Marliani (2022) menunjukkan Kabupaten Bandung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang menganalisis secara komprehensif pengaruh berbagai rasio keuangan terhadap kinerja keuangan daerah, khususnya di wilayah dengan disparitas fiskal tinggi seperti Jawa Timur, dan pada dua periode yang berbeda secara struktural: masa pandemi dan pasca-pandemi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Pengelolaan Belanja Daerah, Rasio Pertumbuhan PAD, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi perbedaan kinerja keuangan antara masa pandemi (2020–2021) dan setelah pandemi (2022–2023).

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang membandingkan pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap kinerja keuangan daerah dalam dua periode kritis, yaitu selama dan setelah pandemi Covid-19, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya secara simultan dan regional. Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif pada level kabupaten/kota di Jawa Timur, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur keuangan daerah serta menjadi referensi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan fiskal yang adaptif dan berkelanjutan.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah daerah), di mana pemerintah diberi mandat untuk mengelola sumber daya publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, teori ini relevan karena organisasi sektor publik sering mengalami masalah ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) yang memungkinkan agen bertindak lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas menjadi kunci utama dalam hubungan keagenan, karena masyarakat sebagai pemberi amanah berhak mengetahui dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Teori ini menekankan pentingnya transparansi dan mekanisme checks and balances untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, termasuk korupsi.

Sejak otonomi daerah diberlakukan, hubungan keagenan semakin kompleks, melibatkan interaksi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Eksekutif berperan sebagai pelaksana kebijakan, legislatif sebagai pengawas, dan masyarakat sebagai pemilik kepentingan publik. Konflik keagenan muncul saat eksekutif berusaha membangun citra positif dalam pelaporan keuangan untuk menjaga legitimasi. Oleh karena itu, laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai regulasi menjadi indikator penting kinerja pemerintah daerah. Pengawasan ketat dan audit yang independen sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan profesional. Semakin tinggi akuntabilitas, semakin rendah potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Teori Signaling (*Signaling Theory*)

Teori signaling dikembangkan oleh Spence (1973) dan menjelaskan bagaimana pihak yang memiliki informasi lebih (insider) memberikan sinyal kepada pihak luar (outsider) untuk mengurangi ketidakpastian. Dalam konteks keuangan publik, sinyal tersebut dapat berupa laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan kinerja dan kondisi aktual pemerintah daerah.

Pemerintah daerah menggunakan rasio keuangan seperti Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi dan Pengelolaan Belanja, Pertumbuhan PAD, serta Derajat Desentralisasi Fiskal sebagai sarana menyampaikan sinyal akuntabilitas dan kinerja kepada publik, DPRD, BPK, dan pemerintah pusat. Mardiasmo (2018) menekankan bahwa sinyal positif dari laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan tata kelola keuangan.

Brigham & Houston (2010) menyatakan bahwa pengelola organisasi cenderung menggunakan keputusan keuangan sebagai media komunikasi kepada pihak luar. Ross (1977) juga menegaskan bahwa struktur keuangan berfungsi sebagai sinyal kualitas suatu entitas. Dalam sektor publik, menurut Suwardjono (2016), informasi keuangan yang relevan dan andal dapat menjadi sinyal penting mengenai kinerja pemerintah daerah.

Dengan demikian, teori signaling mendasari pentingnya rasio keuangan tidak hanya sebagai alat ukur kinerja internal, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan merupakan ukuran penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan oleh organisasi sektor publik, termasuk pemerintah daerah. Aisyah (2019) menyatakan bahwa kinerja keuangan mencerminkan sejauh mana pengelolaan keuangan dilakukan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Evaluasi kinerja ini biasanya dilakukan melalui analisis neraca dan rasio keuangan, yang bertujuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan organisasi dalam mendukung perbaikan berkelanjutan. Pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan merupakan alat penting untuk meningkatkan akuntabilitas publik, serta mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan (Mardiasmo, 2009). Evaluasi ini mencakup aspek keuangan dan non-keuangan, dengan tujuan mengukur tanggung jawab atas penggunaan anggaran yang transparan dan efektif. Menurut Pilat & Morasa (2017), pengukuran ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi dalam mengelola pemerintahan dan keuangan di wilayahnya. Pemerintah daerah berfungsi sebagai entitas sah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan di tingkat lokal. Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai secara finansial, termasuk pajak, retribusi, belanja, serta aset daerah. Prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 meliputi transparansi, akuntabilitas, dan value for money (ekonomi, efisiensi, efektivitas).

Laporan keuangan merupakan media utama untuk menyajikan informasi mengenai kondisi dan kinerja fiskal pemerintah. Laporan ini digunakan untuk keperluan pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan (Pramono, 2014; Chaled & Sarumpaet, 2019). Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari tujuh komponen utama, yakni LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK (Kartoprawiro & Susanto, 2018). Laporan ini menjadi alat pertanggungjawaban kepada masyarakat dan menjadi objek audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Analisis rasio keuangan menjadi alat penting untuk menilai kinerja fiskal pemerintah daerah. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kecenderungan pengelolaan keuangan antarperiode atau antardaerah (Pramono, 2014). Meskipun masih terbatas penggunaannya dalam sektor publik, rasio keuangan terus dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh DPRD, eksekutif, dan masyarakat (Halim, 2012).

Rasio Keuangan Daerah

Rasio keuangan daerah merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja fiskal pemerintah daerah dengan membandingkan pos-pos keuangan tertentu secara proporsional. Rasio ini penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD serta menggambarkan tingkat kemandirian dan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan (Halim, 2012; Pramono, 2014).

Beberapa indikator utama rasio keuangan daerah antara lain:

Rasio Kemandirian Daerah (RKD)

Mengukur kemampuan daerah membiayai pemerintahannya tanpa ketergantungan pada dana pusat. Nilai RKD yang tinggi menunjukkan otonomi fiskal yang kuat (Putri & Rahayu, 2019).

$$RKD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100 \% \quad (1)$$

Rasio Efektivitas PAD (REPAD)

Menilai sejauh mana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat direalisasikan. Semakin tinggi nilai efektivitas, semakin baik kinerja pendapatan daerah. Mengacu pada Halim & Iqbal, (2012), realisasi PAD dihitung dengan rumus berikut

$$REPAD = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100 \% \quad (2)$$

Rasio Efisiensi Belanja Daerah (REFBD)

Menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah. REFBD yang rendah menunjukkan belanja yang lebih hemat (Halim, 2004).

$$REFBD = \frac{\text{Realisasi Belanja daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100 \% \quad (3)$$

Rasio Pengelolaan Belanja Daerah (RPBD)

Menilai keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Nilai rasio yang rendah bisa mengindikasikan defisit anggaran (Welly & Djuniar, 2017).

$$RPBD = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \% \quad (4)$$

Rasio Pertumbuhan PAD (RPPAD)

Mengukur perubahan PAD antarperiode. Rasio ini mencerminkan kemampuan daerah meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan (Halim, 2007).

$$\% \text{ Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100 \% \quad (5)$$

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF)

Menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebagai cerminan tingkat kemandirian fiskal. Nilai RDDF yang tinggi menandakan kapasitas fiskal daerah yang baik (Halim & Iqbal, 2012; Mahmudi, 2016).

$$RDDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \% \quad (6)$$

Penggunaan rasio-rasio ini membantu berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, dalam memahami kinerja dan arah pengelolaan keuangan daerah secara objektif dan terukur.

Hubungan antar Variabel

Rasio Kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan daerah

Rasio Kemandirian Daerah mencerminkan sejauh mana suatu pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan keuangannya secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa bergantung secara signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Tingginya rasio ini menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sebagai komponen utama PAD. Kemandirian yang tinggi mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi lokalnya untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Marizka (2024) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian daerah, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anynda & Hermanto (2020). Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis awal sebagai berikut:

H1: Rasio Kemandirian Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur pada masa pandemi dan sesudah pandemi Covid-19

Rasio Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas PAD merupakan indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi PAD terhadap target PAD. Semakin tinggi rasio ini, semakin menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan lokal seperti pajak daerah dan retribusi. Efektivitas yang tinggi mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan pendapatan yang efisien dan akuntabel. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa efektivitas pendapatan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan sesuai target.

Penelitian Pratiwi & Djazari (2019) membuktikan adanya pengaruh positif antara efektivitas PAD dan kinerja keuangan. Hal ini diperkuat oleh temuan Permatasari & Trisnaningih (2022)

serta Marizka (2024) yang menyatakan bahwa semakin tinggi efektivitas PAD, semakin baik pula kinerja keuangan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas PAD memainkan peran penting dalam mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis awal sebagai berikut:

H2: Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur pada masa pandemi dan sesudah pandemi Covid-19

Rasio Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Belanja Daerah menjadi indikator penting untuk menilai bagaimana pemerintah daerah menggunakan anggaran secara optimal dalam memberikan pelayanan publik. Pengelolaan belanja yang efisien tidak hanya mencegah pemborosan, tetapi juga menunjukkan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab. Efisiensi belanja berkorelasi langsung dengan kinerja keuangan daerah, karena pengeluaran yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan hasil pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tryana & Rizqi (2023) menyatakan bahwa efisiensi anggaran belanja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian Siallagan & Kusmilawaty (2024) juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan adanya hubungan positif antara efisiensi belanja daerah dan kinerja keuangan daerah. Hal ini berarti semakin efisien pengelolaan belanja, maka semakin baik kinerja keuangan yang dihasilkan.

Dengan demikian, efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor kunci dalam mencapai kinerja keuangan yang optimal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis awal sebagai berikut:

H3: Rasio Efisiensi Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur pada masa pandemi dan sesudah pandemi Covid-19

Rasio Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Pengelolaan Belanja Daerah mencerminkan bagaimana pemerintah mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan, pelayanan publik, dan infrastruktur. Masyarakat sebagai pihak principal yang diwakili oleh legislatif memiliki peran penting dalam mengawasi realisasi anggaran. Adi dan Harianto (2007) menyatakan bahwa peningkatan infrastruktur daerah yang dilakukan melalui belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, yang pada gilirannya memperkuat kinerja keuangan daerah.

Penelitian Anynda & Hermanto (2020) dan Permatasari & Trisnaningsih (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin efisien pengelolaan belanja, semakin tinggi pula kualitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Ijtihad & Harsono (2024), yang menyimpulkan bahwa belanja daerah yang dikelola dengan baik dapat

mendorong peningkatan kinerja fiskal pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis awal sebagai berikut:

H4: Rasio Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada masa pandemi dan sesudah pandemi Covid-19.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengindikasikan sejauh mana daerah mampu meningkatkan sumber pendapatan secara mandiri dari tahun ke tahun. PAD yang terus tumbuh mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskalnya, sekaligus menunjukkan kemampuan daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Antari & Sedana (2018), terdapat hubungan positif antara pertumbuhan PAD dan kinerja keuangan daerah. Semakin tinggi pertumbuhan PAD, semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pengeluaran dan menjaga keseimbangan anggaran. Leki et al. (2018) turut memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, pertumbuhan PAD merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis awal sebagai berikut:

H5: Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada masa pandemi dan sesudah pandemi Covid-19

Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Desentralisasi Fiskal merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik melalui pendapatan asli daerah. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal merupakan pilar utama dalam pelaksanaan desentralisasi, karena memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi dan pembangunan lokal melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah.

Tambunan et al. (2018) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian Oktavianti & Idayati (2020) memperkuat pandangan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, yang merupakan salah satu komponen penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur peningkatan kinerja keuangan daerah.

Dengan demikian, secara tidak langsung, derajat desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis awal sebagai berikut:

H6: Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada masa pandemi dan sesudah pandemi Covid-19.

Rasio Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Keuangan Daerah merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengevaluasi kapasitas fiskal dan efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Berbagai rasio seperti rasio kemandirian daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja daerah, pengelolaan belanja daerah, pertumbuhan PAD, serta derajat desentralisasi fiskal mencerminkan aspek kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri dan berkelanjutan.

Agus & Safri (2016) menegaskan bahwa rasio keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Dalam penelitian tersebut, belanja modal sebagai pengukur kinerja keuangan daerah. Semakin tinggi belanja modal, maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rasio keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis awal sebagai berikut:

H7: Rasio Keuangan Daerah secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada masa pandemi dan sesudah pandemi Covid-19.

Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah pada masa pandemi dan sesudah Covid-19

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Pada masa pandemi, pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas fiskal akibat menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), terbatasnya aktivitas ekonomi, serta meningkatnya belanja tak terduga untuk penanganan pandemi. Situasi ini menyebabkan banyak daerah mengalami penurunan efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan.

Selama masa pandemi, sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk sektor kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Namun, karena PAD mengalami penurunan, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Akibatnya, beberapa rasio keuangan seperti rasio kemandirian daerah dan efektivitas PAD mengalami penurunan, yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan secara keseluruhan.

Setelah pandemi (terutama sejak tahun 2022), terjadi tren pemulihan. Aktivitas ekonomi daerah mulai bangkit, pendapatan daerah meningkat, dan program pembangunan kembali berjalan secara normal. Hal ini tercermin dalam peningkatan rata-rata rasio keuangan, terutama pada rasio efektivitas PAD dan pertumbuhan PAD. Pemerintah daerah juga mulai melakukan penguatan kebijakan fiskal, perbaikan tata kelola keuangan, serta digitalisasi pelayanan publik.

Menurut penelitian Nurrahmah (2022) dan (Hakiki *et al.* (2023), pandemi menurunkan kinerja fiskal daerah, namun terjadi pemulihan seiring pulihnya ekonomi dan meningkatnya PAD. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah pada masa pandemi dan sesudah pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis awal sebagai berikut:

H8: Terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada masa pandemi dan sesudah pandemi Covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji pengaruh rasio-rasio keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur selama masa pandemi dan pasca-pandemi COVID-19. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran (LRA) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020 hingga 2023 dan dikumpulkan melalui teknik dokumentasi melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<http://www.djpk.depkeu.go.id>).

Populasi penelitian ini adalah 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sampel diambil secara sensus yaitu 29 kabupaten dan 9 kota dengan periode pengamatan selama empat tahun (2020–2023) sehingga jumlah observasi sebanyak 152 data. Teknik analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda, dan uji beda (*Paired Sample t-Test*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rasio Kemandirian Daerah (X1)	152	0,0947	2,2240	0,3260	0,3312
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X2)	152	0,5919	2,1876	1,0617	0,2182
Rasio Efisiensi Belanja Daerah (X3)	152	0,6806	1,1069	0,9351	0,0787
Rasio Pengelolaan Belanja Daerah (X4)	152	0,8611	1,1606	0,9920	0,0553
Rasio Pertumbuhan PAD (X5)	152	-0,9045	0,4648	0,0319	0,1835
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X6)	152	0,0740	0,6045	0,1957	0,0933
Kinerja Keuangan Daerah (Y)	152	0,8616	1,1613	1,0112	0,0563
Valid N (listwise)	152				

Sumber: Data Sekunder diolah (2025)

Rasio Kemandirian Daerah memiliki nilai minimum sebesar 0,0947 (9,47%) menunjukkan bahwa daerah tersebut yang sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat daripada meningkatkan PAD daerahnya, sedangkan nilai maksimum sebesar 2,2240 (222,40%) mengindikasikan daerah tersebut cukup mandiri secara fiskal dengan keberhasilan memanfaatkan PAD daerahnya daripada dana transfer dari pemerintah pusat. Nilai rata-rata sebesar 0,3260 secara umum bahwa pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur sebagian besar pada periode tersebut masih sangat menggantungkan dana transfer pemerintah pusat. Nilai standar deviasi 0,3312 yang mendekati rata-rata mengindikasikan bahwa data kurang homogen dan terdapat variasi tingkat kemandirian fiskal antar daerah.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum 0,5919 (59,19%) menunjukkan bahwa daerah tersebut belum mampu merealisasikan target pendapatan secara efektif, dan nilai maksimum 2,1876 (218,76%) artinya daerah tersebut mampu melampaui target pendapatan lebih dari dua kali lipat. Nilai rata-rata sebesar 1,0617 artinya secara umum

kabupaten/kota di Jawa Timur mampu merealisasikan target PAD daerahnya. Nilai standar deviasi sebesar 0,2182 lebih kecil dari mean, maka dapat dikatakan bahwa data cukup homogen, menunjukkan kesamaan pencapaian efektivitas pendapatan asli daerah setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

Rasio Efisiensi Belanja Daerah memiliki nilai minimum 0,6806 (68,06%) menunjukkan daerah tersebut mempunyai penyerapan anggaran daerah yang rendah, dan nilai maksimum 1,1069, menunjukkan bahwa adanya overbudget dalam membelanjakan anggaran daerah tetapi nilainya masih dalam batas rasional. Nilai rata-rata sebesar 0,9351 menunjukkan bahwa secara umum kabupaten/kota di Jawa timur dalam membelanjakan anggaran daerahnya dalam katagori cukup efisien. Nilai standar deviasi sebesar 0,0787 yang rendah menunjukkan bahwa tingkat efisiensi antar daerah relatif homogen, menunjukkan kesamaan pencapaian tingkat efisiensi belanja daerah setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

Rasio Pengelolaan Belanja Daerah memiliki nilai minimum sebesar 0,8611 menunjukkan bahwa daerah tersebut dalam kategori defisit, dimana hanya mampu menutupi 86,11% dari total belanja daerah dengan pendapatan yang dimilikinya, dan nilai maksimum sebesar 1,1606 artinya terjadi surplus anggaran yang mencerminkan pengelolaan fiskal yang cukup baik Pemerintah daerah tersebut berhasil mengelola pendapatan melebihi kebutuhan belanja daerahnya. Nilai rata-rata sebesar 0,9920 menunjukkan bahwa pengelolaan belanja cenderung seimbang. Dalam kata lain daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur mampu menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerahnya. Dengan nilai standar deviasi yang hanya 0,0553, data ini tergolong sangat homogen, menandakan bahwa sebagian besar daerah mengelola belanja dengan cara yang hampir seragam.

Rasio Pertumbuhan PAD menunjukkan nilai minimum sebesar -0,9045 (-90,45%) Nilai minimum negatif menunjukkan adanya penurunan PAD secara signifikan pada daerah tersebut dan nilai maksimum 0,4648 (46,48%) menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan PADnya hampir setengah kali lipat dalam satu periode anggaran. Nilai rata-rata sebesar 0,0319 atau hanya sekitar 3,19%, menandakan secara umum daerah kabupaten/kota di Jawa timur pertumbuhan PADnya tergolong rendah. Dengan standar deviasi 0,1835 yang cukup besar dibandingkan dengan mean, menunjukkan bahwa data ini tidak homogen, dan terdapat perbedaan pertumbuhan PAD yang signifikan setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki nilai sebesar 0,0740 (7,40%) artinya daerah tersebut ketergantungan terhadap dana transfer pusat sangat tinggi, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,6045 (60,45%) menunjukkan daerah tersebut memiliki kemandirian fiskal yang tinggi karena mampu mengoptimalkan potensi pendapatan lokal. Nilai rata-rata sebesar 0,1957 artinya secara umum menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih sangat kecil. Nilai standar deviasi sebesar 0,0933 lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa data homogen, dengan variasi data tidak terlalu berbeda setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kinerja Keuangan Daerah memiliki nilai minimum 0,8616 (86,16%) artinya pemerintah daerah menerapkan efisiensi tinggi dalam realisasi anggaran belanja, nilai maksimum 1,1613 menunjukkan terdapat daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur membelanjakan

anggarannya hingga 116,13% dari total pendapatan yang diperolehnya (over budget), sehingga berpotensi menciptakan defisit anggaran. Nilai rata-rata sebesar 1,0112 menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah secara umum berada pada kategori baik. Nilai standar deviasi yang hanya sebesar 0,0563 menandakan bahwa data sangat homogen, menunjukkan keseragaman capaian kinerja keuangan antar daerah yang diamati.

Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menguji pengaruh enam variabel independen terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Uji Regresi Linear Berganda dilakukan setelah lolos dari uji asumsi klasik. Berikut hasil analisis regresi linear berganda:

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,215	1,739		1,849	0,067
Rasio Kemandirian Daerah (X1)	0,119	0,114	0,062	1,044	0,298
Rasio Efektivitas PAD (X2)	-0,248	0,396	-0,047	-0,625	0,533
Rasio Efisiensi Belanja Daerah (X3)	-0,743	0,941	-0,057	-0,789	0,431
Rasio Pengelolaan Belanja Daerah (X4)	-1,502	1,235	-0,082	-1,216	0,226
Rasio Pertumbuhan PAD (X5)	0,496	0,041	0,706	11,966	0,000
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X6)	-0,194	0,156	-0,074	-1,246	0,215

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah (Y)

Sumber: Data Sekunder diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 2 diatas hasil estimasi menunjukkan bahwa model regresi memiliki persamaan sebagai berikut:

$$KKD = \alpha + \beta_1 RKD + \beta_2 REPAD + \beta_3 REFBD + \beta_4 RPB D + \beta_5 RPPAD + \beta_6 RDDDF + e \quad (7)$$

$$KKD = 3,215 + 0,119RKD - 0,248REPAD - 0,743REFBD - 1,502RPB D + 0,496RPPAD - 0,194RDDDF \quad (8)$$

Berdasarkan persamaan diatas, dapat disimpulkan bahwa Rasio Pertumbuhan PAD (X5) memiliki koefisien positif dan paling besar (0,496), menunjukkan pengaruh positif yang paling kuat terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Rasio Kemandirian Daerah (X1) juga berpengaruh positif, meskipun relatif kecil (0,119). Sebaliknya, empat variabel lainnya menunjukkan pengaruh negatif, yaitu Rasio Efektivitas PAD (-0,248), Rasio Efisiensi Belanja Daerah (-0,743), Rasio Pengelolaan Belanja Daerah (-1,502), dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (-0,194). Hasil ini mengindikasikan bahwa hanya Rasio Pertumbuhan PAD yang memberikan kontribusi positif signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah, sementara variabel lainnya belum menunjukkan pengaruh positif yang kuat dalam model ini.

Uji F(Simultan)/Kelayakan Model

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sekaligus menilai kelayakan model regresi.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Uji F dan Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b	ANOVA ^a
----------------------------	--------------------

Model	R	R Square	Adjusted R Square	df	F	Sig.
	.715 ^a	.511	.490			
Regression				6	25,226	0,000 ^b
Residual				145		
Total				151		
Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah (Y)						
Predictors: (Constant), Rasio Kemandirian Daerah (X1), Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah (X2), Rasio Efisiensi Belanja Daerah (X3), Rasio Pengelolaan Belanja Daerah (X4), Rasio Pertumbuhan PAD (X5), Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X6)						
Sumber: Data Sekunder diolah (2025)						

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 25,226 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Nilai F_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ dengan $df_1 = 6$ dan $df_2 = 145$ adalah 2,1616. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai sig. $< 0,05$, maka model regresi dinyatakan signifikan secara simultan dan layak digunakan. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Artinya, seluruh variabel X dalam penelitian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Uji t (Partial)

Berdasarkan pada Tabel 2, diperoleh bahwa dari enam variabel independen yang diuji, hanya satu variabel yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai t sebesar 11,966 $> 1,9765$ dan signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$), sehingga hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Rasio Pertumbuhan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Sementara itu, lima variabel lainnya tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Pengelolaan Belanja Daerah, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal masing-masing memiliki nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (1,9765) dan tingkat signifikansi di atas 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_a) ditolak dan menerima hipotesis nol (H_0), yang menyatakan bahwa variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Hasil ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, hanya pertumbuhan PAD yang menjadi faktor penentu kinerja keuangan daerah yang signifikan, sementara rasio-rasio lain belum menunjukkan kontribusi signifikan dalam model parsial.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 3 di atas, nilai R Square sebesar 0,511 menunjukkan bahwa 51,1% variasi dalam Kinerja Keuangan Daerah (Y) dapat dijelaskan oleh enam variabel independen yang digunakan dalam model regresi. Sementara itu, Adjusted R Square sebesar 0,490 menggambarkan pendekatan yang lebih aman dengan menyatakan bahwa sekitar 49% variasi dalam variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel bebas, setelah disesuaikan dengan jumlah variabel prediktor yang digunakan.

Perbedaan antara nilai R Square dan Adjusted R Square yang tidak terlalu besar mengindikasikan bahwa model cukup stabil, dan penambahan variabel baru ke dalam model

cenderung tidak memberikan peningkatan signifikan dalam kemampuan prediksi model tersebut. Hal ini menandakan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sudah cukup baik dalam menjelaskan variabilitas dari kinerja keuangan daerah, meskipun masih terdapat sekitar 51% variasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Uji Beda (*T-Paired Test*)

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam Kinerja Keuangan Daerah (KKD) pada masa pandemi dan sesudah pandemi Covid-19.

Paired Samples Test									
Samples		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Difference				
					Lower	Upper			
Pair 19	KKD saat Covid- KKD sesudah Covid-19	-0,057775	0,0744734	0,0085427	-0,0747929	-0,04076	-6,763	75	0,000

Berikut ini hasil uji *Paired Samples t-Test*:

Tabel 4. Hasil Uji Beda (*T-Paired Test*)

Sumber: Data Sekunder diolah (2025)

Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kinerja keuangan daerah saat dan sesudah pandemi Covid-19. Nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ menyatakan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak, dan menerima hipotesis alternatif (H_a), yaitu bahwa terdapat perbedaan nyata antara kedua periode tersebut. Nilai t hitung sebesar -6,763 yang cukup besar secara absolut menunjukkan bahwa perbedaan ini tergolong kuat. Tanda negatif mengindikasikan bahwa kinerja keuangan daerah pada masa pandemi secara konsisten lebih rendah dibandingkan setelah pandemi. Nilai interval kepercayaan 95% berada di antara -0,0747929 hingga -0,04076, sepenuhnya berada di bawah nol. Hal ini memperkuat bukti bahwa kinerja keuangan daerah mengalami peningkatan signifikan setelah pandemi berakhir.

Secara umum, hasil ini mencerminkan pemulihan fiskal yang cukup merata dan positif di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh perbaikan kondisi ekonomi nasional, pelonggaran kebijakan fiskal, serta peningkatan kembali kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi pengelolaan belanja daerah pascapandemi.

Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Meskipun arah hubungan positif mendukung teori bahwa kemandirian fiskal seharusnya meningkatkan kinerja, namun secara statistik pengaruhnya tidak kuat. Hal ini mencerminkan bahwa besarnya rasio kemandirian belum

tentu menunjukkan kekuatan fiskal riil daerah, terutama bila PAD tampak tinggi hanya karena rendahnya dana transfer dari pusat.

Secara teoritis, daerah yang mandiri diharapkan mampu membiayai pengeluarannya melalui PAD. Namun, dalam praktiknya, peran PAD masih terbatas dan ketergantungan terhadap dana pusat masih tinggi, sehingga rasio kemandirian belum menjadi indikator utama peningkatan kinerja keuangan.

Temuan ini sejalan dengan Azzahro et al. (2023) yang menunjukkan bahwa rasio kemandirian tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, penelitian Anynda & Hermanto (2020) menunjukkan hasil berbeda, di mana kemandirian fiskal berpengaruh positif. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pengaruh rasio kemandirian sangat bergantung pada konteks dan waktu penelitian.

Dengan demikian, peningkatan kemandirian fiskal perlu diiringi dengan penguatan kapasitas pengelolaan PAD serta transparansi dan efisiensi belanja daerah agar mampu berdampak nyata terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Meskipun secara teoritis efektivitas PAD diharapkan meningkatkan kinerja keuangan, temuan ini menunjukkan bahwa capaian target PAD belum cukup kuat untuk memengaruhi kinerja secara keseluruhan. Rasio efektivitas PAD yang tinggi belum tentu mencerminkan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, terutama jika target PAD ditetapkan terlalu rendah atau nominal PAD masih kecil. Ketergantungan tinggi pada dana transfer dari pusat juga menjadi faktor penghambat kontribusi PAD terhadap kinerja keuangan.

Temuan ini sejalan dengan Marizka (2024), yang menyatakan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan karena tidak selalu diikuti dengan efisiensi pengeluaran atau perbaikan kualitas pengelolaan keuangan. Sebaliknya, Rahil et al. (2024) menemukan pengaruh positif yang signifikan, menekankan pentingnya efektivitas PAD sebagai indikator keberhasilan fiskal daerah.

Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas PAD perlu ditinjau tidak hanya dari sisi capaian target, tetapi juga dari strategi peningkatan kapasitas fiskal, penetapan target yang lebih realistis dan progresif, serta manajemen keuangan daerah yang akuntabel.

Pengaruh Rasio Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Meskipun secara teori efisiensi belanja diharapkan mendorong kinerja keuangan yang lebih baik, hasil ini mengindikasikan bahwa efisiensi belanja belum tentu mencerminkan keberhasilan pengelolaan keuangan, terutama bila efisiensi disebabkan oleh rendahnya realisasi anggaran atau penundaan program prioritas.

Kondisi pandemi COVID-19 turut memengaruhi, di mana banyak program mengalami keterlambatan atau realisasi anggaran yang rendah, sehingga menghasilkan rasio efisiensi tinggi secara nominal tetapi tidak berdampak positif terhadap kinerja keuangan. Temuan ini sejalan dengan Rahil et al. (2024) yang menyatakan bahwa efisiensi belanja tidak selalu berpengaruh

signifikan karena bisa mencerminkan kelemahan dalam pelaksanaan program. Sebaliknya, Tryana & Rizqi (2023) menemukan pengaruh signifikan positif, menandakan pentingnya konteks dalam menginterpretasikan rasio ini. Dengan demikian, efisiensi anggaran perlu diseimbangkan dengan efektivitas pelaksanaan program agar dapat benar-benar meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Rasio Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil regresi menunjukkan bahwa Rasio Pengelolaan Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Secara teoritis, rasio ini menggambarkan keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal. Idealnya, proporsi belanja modal yang lebih tinggi mencerminkan alokasi anggaran yang produktif, mendukung efisiensi fiskal dan kinerja keuangan. Namun, di banyak daerah, termasuk di Jawa Timur selama 2020–2023, struktur belanja masih didominasi belanja operasional, yang berdampak terbatas terhadap peningkatan kinerja fiskal.

Hasil ini konsisten dengan temuan Marizka (2024), yang menyatakan bahwa pengaruh pengelolaan belanja terhadap kinerja tidak signifikan, hal ini disebabkan oleh belum optimalnya alokasi dan implementasi anggaran belanja daerah dalam menunjang output pembangunan daerah secara langsung. Sebaliknya, berbeda dengan Anynda & Hermanto (2020) yang menemukan pengaruh signifikan positif dari belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah.

Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan belanja sangat kontekstual, bergantung pada kualitas implementasi anggaran dan orientasi pembangunan. Oleh karena itu, perbaikan struktur belanja daerah perlu diarahkan tidak hanya pada rasio belanja modal, tetapi juga pada kebermanfaatan dan keberlanjutan program yang dibiayai.

Pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa Rasio Pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan PAD, semakin baik pula kinerja keuangan daerah.

Pertumbuhan PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi fiskal lokal secara efektif, baik melalui perluasan basis pajak maupun optimalisasi pengelolaan pendapatan. Dengan peningkatan PAD tiap tahunnya, kapasitas fiskal daerah menguat, memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar bagi pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan Halim (2012) yang menilai bahwa pertumbuhan PAD merupakan indikator penting efektivitas kebijakan pendapatan dan efisiensi fiskal.

Temuan ini didukung oleh Hutaaruk (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan dimana kemampuan PAD memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah. Namun, berbeda dengan Handayani & Muzdalifa (2024), yang berpendapat bahwa pertumbuhan PAD tidak berpengaruh signifikan jika tidak diikuti oleh efisiensi belanja dan perencanaan yang baik.

Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan PAD terhadap kinerja keuangan sangat kontekstual, tergantung pada kapasitas fiskal, kualitas pengelolaan anggaran, serta struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan tidak

hanya penerimaan PAD, tetapi juga sistem pengelolaannya agar berkontribusi nyata dan berkelanjutan terhadap peningkatan kinerja keuangan.

Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya, peningkatan desentralisasi fiskal tidak secara langsung berdampak terhadap perbaikan kinerja keuangan daerah. Secara teoritis, rasio ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah berdasarkan proporsi PAD terhadap total pendapatan. Namun, dalam konteks Provinsi Jawa Timur pada periode 2020–2023, dominasi dana transfer pusat menyebabkan rasio ini belum mampu mencerminkan otonomi fiskal yang kuat.

Temuan ini sejalan dengan Christy et al. (2019) yang menunjukkan bahwa PAD dan pendapatan transfer (komponen desentralisasi fiskal) tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio efektivitas keuangan atau pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam arti, meskipun dana daerah meningkat, hal itu tidak otomatis meningkatkan kinerja keuangan atau pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penelitian Tambunan et al. (2018) menemukan pengaruh signifikan dari rasio ini terhadap kinerja keuangan, terutama pada daerah dengan kontribusi PAD yang tinggi.

Perbedaan hasil ini menegaskan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal sangat kontekstual, tergantung pada struktur ekonomi lokal, kebijakan fiskal, dan kapasitas institusional. Oleh karena itu, peningkatan otonomi fiskal harus diiringi dengan strategi penguatan PAD, efisiensi anggaran, dan reformasi tata kelola agar berkontribusi nyata terhadap kinerja keuangan daerah.

Secara Simultan Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi Belanja Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Pertumbuhan PAD, dan Derajat Desentralisasi Fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan signifikansi lebih kecil dari 0,05, mengindikasikan bahwa model regresi memiliki kekuatan penjelas yang baik.

Koefisien determinasi (Adjusted R^2) sebesar 0,490 menunjukkan bahwa 49% variasi kinerja keuangan daerah dijelaskan oleh keenam rasio keuangan, sedangkan sisanya 51% dipengaruhi faktor lain di luar model, seperti kondisi ekonomi daerah, kebijakan nasional, atau kapasitas manajerial pemerintah daerah.

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,715 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif antara variabel independen dengan kinerja keuangan daerah. Hal ini menegaskan bahwa semakin optimal pengelolaan fiskal daerah dari sisi pendapatan maupun belanja, maka semakin baik pula kinerja keuangannya.

Temuan ini konsisten dengan Agus & Safri (2016) yang menegaskan bahwa rasio keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Dalam penelitian tersebut belanja modal sebagai pengukur kinerja keuangan daerah dimana semakin meningkat belanja modal kinerja keuangan daerah semakin baik. Hal ini dilakukan dengan pendekatan fiskal yang terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi anggaran dan otonomi fiskal daerah. Meski pengaruh

simultan signifikan, analisis parsial tetap diperlukan karena tidak semua variabel memberikan kontribusi signifikan secara individual.

Secara keseluruhan, hasil ini menggarisbawahi perlunya penguatan pengelolaan fiskal daerah yang komprehensif sebagai strategi utama dalam peningkatan kinerja keuangan, pelayanan publik, dan pembangunan berkelanjutan.

Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur saat pandemi Covid-19 dan sesudah pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap tata kelola keuangan daerah di Jawa Timur. Selama pandemi (2020–2021), kinerja keuangan menurun tajam akibat turunnya PAD, efektivitas, dan pertumbuhan PAD, serta adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi yang menurunkan efisiensi belanja. Rasio kemandirian fiskal juga melemah akibat meningkatnya ketergantungan pada transfer pusat. Pasca pandemi (2022–2023), terjadi pemulihan yang cukup signifikan. PAD mulai meningkat, diikuti perbaikan pada rasio efektivitas dan pertumbuhan PAD, serta efisiensi dan pengelolaan belanja yang lebih baik. Namun, tingkat kemandirian fiskal belum menunjukkan perbaikan berarti.

Hasil paired samples t-test menunjukkan nilai signifikan, yang mengindikasikan terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan daerah saat pandemi dan sesudahnya. Nilai rata-rata selisih bernilai negatif menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan setelah pandemi.

Temuan ini sejalan dengan Nurrahmah (2022) dan (Hakiki *et al.* (2023) yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan meskipun pandemi menurunkan kinerja fiskal daerah, namun terjadi pemulihan seiring pulihnya ekonomi dan meningkatnya PAD. Namun berbeda dengan Arfath & Priyono (2023) yang menemukan tidak ada perbedaan signifikan akibat belum optimalnya pemulihan PAD, serta perbaikan pascapandemi lebih disebabkan oleh transfer pusat dibandingkan kapasitas fiskal daerah sendiri.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi menekan kinerja fiskal daerah, namun pemulihan pasca pandemi menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dan uji parsial, hanya Rasio Pertumbuhan PAD yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hanya pertumbuhan PAD yang berpengaruh kinerja keuangan, sementara variabel lain tidak berpengaruh. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pertumbuhan PAD menjadi faktor kunci dalam mendorong kinerja keuangan yang lebih baik.

Pertumbuhan PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan. Daerah dengan PAD yang tumbuh konsisten cenderung memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai belanja publik secara efektif, sehingga meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

Sementara itu, rasio-rasio lainnya tidak menunjukkan pengaruh signifikan, yang kemungkinan disebabkan oleh masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, keterbatasan dalam efisiensi belanja, serta kelemahan dalam implementasi desentralisasi fiskal yang belum sepenuhnya meningkatkan kapasitas manajerial daerah.

Hasil uji beda (*paired t-test*) menunjukkan terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan daerah antara masa pandemi (2020–2021) dan sesudah pandemi (2022–2023), dengan kecenderungan penurunan kinerja pascapandemi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemulihan fiskal pasca-COVID-19 masih menghadapi tantangan struktural, meskipun membuka peluang penguatan tata kelola keuangan daerah ke depan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah serta dampak pandemi terhadap stabilitas fiskal lokal.

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi pertumbuhan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan, penguatan basis data pajak, inovasi layanan publik, serta pemberdayaan BUMD. Di sisi lain, efisiensi belanja daerah perlu diarahkan pada peningkatan outcome pelayanan publik, bukan hanya efisiensi nominal anggaran. Evaluasi terhadap kemandirian fiskal dan kebijakan desentralisasi juga perlu dilakukan agar otonomi fiskal benar-benar mencerminkan kapasitas institusional daerah.

Adapun keterbatasan penelitian ini meliputi ruang lingkup variabel yang terbatas pada indikator keuangan, penggunaan data sekunder agregat, serta pendekatan kuantitatif yang tidak mengakomodasi konteks lokal. Penelitian selanjutnya disarankan mengadopsi pendekatan mixed-methods dan mempertimbangkan variabel kelembagaan, sosial, serta kualitas tata kelola anggaran, untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, E., & Safri, M. (2016). Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 37–50. <https://doi.org/10.22437/ppd.v4i1.3531>
- Aisyah, A. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Laba Perusahaan Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Malindo Di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2), 21–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.35906/jm001.v3i2.304>
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080–1110. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(10).
- Arfath, D. M., & Priyono, N. (2023). Analisis Perbandingan Rasio Kinerja Keuangan Pemprov Dki Jakarta Sebelum Dan Pada Saat Pandemi Covid-19. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 440–451. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v7i1.2232>
- Azzahro, N. A., Murhaban, M., Ikhyannuddin, I., & Nurhasanah, N. (2023). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(4), 577. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i4.11284>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2010). *Fundamentals of Financial Management* (12th ed). South-Western Cengage Learning.
- Chaled, S., & Sarumpaet, S. (2019). EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN No. 45 PADA ORGANISASI NIRLABA DI BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(1), 1–14. <https://doi.org/10.23960/jak.v24i1.112>
- Christy, E., Walewangko, E. N., & Wauran, P. C. (2019). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04), 1–12.
- Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183–199. <https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3628>
- Hakiki, D., Tumija, & Agustina, I. (2023). Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Author. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 10(1), 56–78. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4 Ed.)*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Akuntansi keuangan daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Handayani, N. A., & Muzdalifa. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 7(2), 421–434. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jiep.v7i2.312>
- Hutauruk, M. F. M. (2024). Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab / Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 42932–42939. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i3.20606>
- Ijtihad, R., & Harsono, I. (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan

- Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ganec Swara*, 18(1).
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242>
- Leki, Y., Naukoko, A. T., & Sumua, J. I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5), 164–174.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Marizka, A. (2024). *Pengaruh Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2023)* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38544>
- Marliani, N. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020*. 14(1), 11–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>
- Nurrahmah, S. (2022). (2022). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Jawa Timur*. *Jurnal Keuangan Daerah*, 5(3), 123–134.
- Oktavianti, Y. A., & Idayati, F. (2020). PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR Farida Idayati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 1–20.
- Permatasari, D. A., & Trisnarningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. *Accountability*, 6(1), 45. <https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56>
- Pradana, R. A., & Akbar, F. S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Surabaya Periode 2018-2021. *Sustainable*, 3(1), 20. <https://doi.org/10.30651/stb.v3i1.18408>
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7(13), 83–112. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52353/ama.v7i1.97>
- Pratiwi, T. Y., & Djazari, M. (2019). Pengaruh Pad, Dana Perimbangan, Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah 2012-2016. *Kajian Ilmu Akuntansi*, 7(3), 1–15.
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Barat. *JASa: Jurnal Akuntansi Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(2), 256–268. <https://doi.org/10.36555/jasa.v3i2.429>
- Rahil, Widodo, D. P., & Nuraeni, Y. S. (2024). Pengaruh rasio efektifitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada dinas lingkungan hidup

- provinsi dki jakarta periode 2018-2023. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 12(2), 107–115.
- Ross, S. A. (1977). The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach. *The Bell Journal of Economics*, 8(1), 23–40. <https://doi.org/10.2307/3003485>
- Siallagan, Y. T., & Kusmilawaty. (2024). Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dan Kinerja Keuangan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 165–176. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i1.879>
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1882010>
- Suwardjono. (2016). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (Edisi keti). BPFE Yogyakarta.
- Tambunan, J., Lubis, T. A., & Zamzami, H. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi. *JAKU: Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 2(1), 14–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jaku.v2i1.4681>
- Tryana, A. L., & Rizqi, R. M. (2023). Pengaruh Restrukturisasi Efisiensi Biaya Strategi Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(3), 825–833. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i3.3115>
- Welly, W., & Djuniar, L. (2017). Kinerja keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2009-2015. *Jurnal Ekonomi*, 22(1), 1–21. <https://doi.org/10.24912/je.v22i1.178>.